



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2009

KEPOLISIAN. Laporan. Gangguan Keamanan.
Kamtibmas. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG
SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat ditentukan oleh wujud penampilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral, dan modern, yang dilandasi oleh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna;
 - b. bahwa guna menjamin kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penyampaian data/informasi yang efektif dan efisien, yang dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan tindakan nyata, maka diperlukan penataan sistem manajemen informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat, tepat dan akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dan secara fungsional terkait satu sama lain serta menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

4. Kejahatan menonjol adalah kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan prioritas.
5. Kejahatan konvensional/nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.
6. Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.
7. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).
8. Kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.
9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
10. Kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang menjadi opini publik, sorotan media massa, atensi pimpinan dan perhatian masyarakat internasional.
11. Data adalah fakta dari suatu keadaan atau kejadian yang merupakan bahan keterangan yang belum diolah.
12. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi kesatuan organisasi Polri dalam melaksanakan proses sistem laporan gangguan Kamtibmas (Sislap GK);
- b. terwujudnya keseragaman bagi kesatuan organisasi Polri dalam Sislap GK yang dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, aman, dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini adalah:

- a. cepat, yaitu data/informasi yang disajikan tepat waktu;
- b. tepat, yaitu data/informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan;
- c. akurat, yaitu data/informasi yang disajikan secara lengkap baik kuantitas maupun kualitas;
- d. aman, yaitu data/informasi yang disajikan dijamin kerahasiaan;
- e. akuntabel, yaitu data/informasi yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penyajian informasi;
- d. penggunaan informasi.

BAB II

PENGUMPULAN DATA

Bagian Kesatu

Penggolongan Data

Pasal 5

Penggolongan data gangguan Kamtibmas terdiri dari golongan:

- a. kejahatan;
- b. pelanggaran;
- c. gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum; dan
- d. bencana.

Pasal 6

Golongan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. kejahatan konvensional;
- b. kejahatan *transnational*;
- c. kejahatan terhadap kekayaan negara;
- d. kejahatan berimplikasikan kontinjensi; dan
- e. pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 7

Golongan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP.

Pasal 8

Golongan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain gangguan terhadap:

- a. orang;
- b. barang;
- c. hewan;
- d. lingkungan hidup;
- e. sarana dan fasilitas.

Pasal 9

Golongan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi bencana:

- a. alam;
- b. non alam; dan
- c. sosial.

Bagian Kedua

Pengkodean

Pasal 10

- (1) Setiap data gangguan Kamtibmas diberikan kode berupa angka sebanyak 7 (tujuh) digit untuk memudahkan dalam proses aplikasi komputerisasi sistem informasi operasional Polri.

- (2) Kode gangguan Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut:
- a. digit pertama adalah untuk penggolongan data, dengan ketentuan:
 1. angka “1” (satu) untuk golongan kejahatan;
 2. angka “2” (dua) untuk golongan pelanggaran;
 3. angka “3” (tiga) untuk golongan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum; dan
 4. angka “4” (empat) untuk golongan bencana;
 - b. digit kedua adalah kelompok dalam satu golongan kejahatan, dengan ketentuan:
 1. golongan “1” (kejahatan), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok kejahatan konvensional/nasional;
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok kejahatan *transnational*;
 - c) angka “3” (tiga) untuk kelompok kejahatan terhadap kekayaan negara;
 - d) angka “4” (empat) untuk kelompok kejahatan yang berimplikasikan kontinjensi; dan
 - e) angka “5” (lima) untuk kelompok pelanggaran HAM;
 2. golongan “2” (pelanggaran hukum), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP; dan
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok pelanggaran di luar KUHP;
 3. golongan “3” (gangguan ketenteraman/ketertiban), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok gangguan terhadap orang;
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok gangguan terhadap barang;
 - c) angka “3” (tiga) untuk kelompok gangguan terhadap hewan;
 - d) angka “4” (empat) untuk kelompok gangguan terhadap lingkungan hidup; dan
 - e) angka “5” (lima) untuk kelompok gangguan terhadap sarana dan fasilitas umum;
 4. golongan “4” (bencana) kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok bencana alam; dan

- b) angka “2” (dua) untuk kelompok bencana non alam; dan
- c) angka “3” (tiga) untuk kelompok bencana sosial;
- c. digit ketiga adalah jenis kejahatan/pelanggaran/gangguan, dengan ketentuan:
 - 1. angka “1” (satu) untuk jiwa;
 - 2. angka “2” (dua) untuk harta benda;
 - 3. angka “3” (tiga) untuk susila;
 - 4. angka “4” (empat) untuk keamanan negara;
 - 5. angka “5” (lima) untuk kejahatan/pelanggaran tertentu atau khusus; dan
 - 6. angka “6” (enam) untuk pelanggaran/gangguan terhadap ketertiban umum;
- d. digit keempat sampai dengan ketujuh adalah nomor urut dalam masing-masing kelompok.

Pasal 11

Daftar penggolongan data gangguan Kamtibmas tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

Pasal 12

Pengumpulan data dilakukan melalui laporan gangguan Kamtibmas, yang terdiri dari:

- a. laporan insidentil, meliputi:
 - 1. laporan segera; dan
 - 2. laporan kemajuan;
- b. laporan berkala (periodik), meliputi:
 - 1. laporan harian;
 - 2. laporan mingguan; dan
 - 3. laporan bulanan.

Pasal 13

Laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuat bila terjadi gangguan Kamtibmas yang sangat menonjol atau meresahkan masyarakat, dan perlu segera diketahui oleh Pimpinan.

Pasal 14

- (1) Laporan segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, memuat informasi peristiwa/kejadian secara singkat, sekurang-kurangnya memuat unsur:
 - a. apa yang terjadi;
 - b. dimana terjadi;
 - c. kapan terjadi;
 - d. siapa pelaku; dan
 - e. siapa korban/saksi.
- (2) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, merupakan laporan perkembangan penanganan dari peristiwa/kejadian, yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pasal 15

Format laporan insidentil tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1, memuat data kuantitatif dan kualitatif peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (pukul 00.00 s.d. 24.00 waktu setempat).
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Polsek sampai Markas Besar Polri.
- (3) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka. SPK) atau Kepala Siaga (Ka. Siaga) dengan menggunakan format Laporan Harian Gangguan Kamtibmas (LHGK).
- (4) *Entry* data LHGK baik secara manual maupun melalui sarana/perangkat *Management Information System* Operasional (MIS Opsnal) dilakukan oleh petugas operator yang ditunjuk dan terlatih.
- (5) Format LHGK tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2, memuat rekapitulasi peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

- (2) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Operasional (Bag Ops) Polres/ta/tro/Poltabs/Polwil/tabs dan Biro Operasi (Ro Ops) Polda serta Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Polri yang dibantu oleh fungsi Intelijen, Reserse, Samapta, Lalu Lintas, Polisi Perairan dan Provos.
- (3) Laporan mingguan dibuat secara manual dan melalui sarana teknologi informasi yang tersedia, dilaporkan setiap hari Senin kepada pimpinan kesatuan dan secara berjenjang ke kesatuan atas.
- (4) Format Laporan Mingguan Gangguan Kamtibmas (LMGK) tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3, memuat rekapitulasi peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 1 (satu) bulan, yang menggambarkan jumlah peristiwa atau kejadian yang:
 - a. dilaporkan;
 - b. diselesaikan; dan
 - c. merupakan sisa perkara/tunggakan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejahatan;
 - b. pelanggaran;
 - c. gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban;
 - d. bencana;
 - e. kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas; dan
 - f. tahanan Polri.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagops Polres/ta/tro/Poltabs/Polwil/tabs dan Roops Polda serta Pusdalops Polri yang dibantu oleh fungsi Intelijen, Reserse, Samapta, Lalu Lintas, Polisi Perairan, dan Provos, dan dilaporkan secara berjenjang ke kesatuan atas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format Laporan Bulanan Gangguan Kamtibmas (LBGK) tercantum dalam lampiran V .a. s.d. V.f. yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA

Pasal 19

- (1) Data gangguan Kamtibmas diolah dengan menggunakan rumus yang lazim digunakan.

- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perhitungan perkembangan jumlah kejahatan dalam periode waktu tertentu;
 - b. perhitungan penyelesaian perkara kejahatan dalam periode waktu tertentu;
 - c. perhitungan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan;
 - d. perhitungan kejahatan yang meresahkan masyarakat; dan
 - e. perhitungan selang waktu terjadinya kejahatan.
- (3) Contoh dan rumus yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, dan VI.6 yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V

PENYAJIAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Penyajian informasi merupakan bagian dari proses Sistem Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi (Sispullahjianfo) gangguan Kamtibmas.
- (2) Penyajian informasi dilakukan dengan menggunakan berbagai media, yang disajikan dalam bentuk panel data konvensional maupun menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Format penyajian informasi tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Penyajian informasi dapat berupa tabel dan/atau grafik (*chart*).
- (2) Penyajian informasi dalam bentuk tabel berisi angka-angka gangguan Kamtibmas secara rinci.
- (3) Penyajian informasi dalam bentuk grafik (*chart*) merupakan visualisasi gangguan Kamtibmas yang dapat dibaca secara cepat dan mudah.

Pasal 22

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berisi tentang:

- a. perkembangan jumlah kejahatan disertai persentase penyelesaian;
- b. perkembangan resiko jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan;
- c. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- d. perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan;
- e. pola kejahatan;

- f. modus operandi kejahatan;
- g. pola tempat terjadinya kejahatan;
- h. pola waktu terjadinya kejahatan;
- i. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban;
- j. perkembangan penindakan pelanggar lalu lintas;
- k. perkembangan jumlah penindakan pelanggaran hukum (Tipiring); dan
- l. perkembangan jumlah tahanan.

BAB VI PENGUNAAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Informasi dapat digunakan untuk:
 - a. kepentingan analisa dan evaluasi terhadap kondisi kerawanan daerah;
 - b. antisipasi penanggulangan;
 - c. strategi kebijakan; dan
 - d. publik.
- (2) Untuk kepentingan analisa dan evaluasi kerawanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan, pelanggaran, dan penyelesaiannya;
 - b. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - c. resiko terkena kejahatan; dan
 - d. selang waktu terjadinya kejahatan.
- (3) Untuk kepentingan antisipasi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan dan pelanggaran;
 - b. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - c. modus operandi kejahatan;
 - d. pola tempat kejahatan;
 - e. pola waktu kejahatan;
 - f. pola kejahatan;
 - g. perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan; dan
 - h. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban.
- (4) Untuk kepentingan penetapan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan disertai prosentase penyelesaian;
 - b. perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan;

- c. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - d. perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan;
 - e. pola kejahatan;
 - f. operandi kejahatan;
 - g. pola tempat terjadinya kejahatan;
 - h. pola waktu terjadinya kejahatan;
 - i. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban; dan
 - j. perkembangan jumlah tahanan.
- (5) Untuk kepentingan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disajikan informasi mengenai:
- a. perkembangan jumlah kejahatan; dan
 - b. perkembangan jumlah dan korban kecelakaan lalu lintas.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan administrasi Sislap GK berpedoman kepada petunjuk administrasi yang berlaku.
- (2) Personel yang mengawaki Manajemen Informasi Sistem (MIS) Polri ditunjuk berdasarkan surat perintah kepala kesatuan organisasi.
- (3) Materiil/logistik MIS Polri menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tergelar di satuan organisasi.
- (4) Kegiatan Pullahjianfo gangguan Kamtibmas yang berbasis MIS Polri menggunakan anggaran DIPA /RKA-KL Satker.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol.: Juklak/14/XII/1982 tanggal 31 Desember 1982 tentang Sistem Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data Lingkungan Operasional Polri; dan
 - b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/46/I/1988 tanggal 26 Januari 1988 tentang Daftar Gangguan Kamtibmas;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
2. FORMAT LAPORAN INSIDENTIL
3. FORMAT LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK)
4. FORMAT LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK)
5. FORMAT LAPORAN BULANAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LBGK)
6. CONTOH DAN RUMUS DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
7. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI

DAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS (GK)Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Terhadap ketertiban umum. | KUHP 154 – 181 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Membahayakan keamanan umum. | KUHP 187 – 206 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran). | KUHP 187 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus/banjir . | KUHP 188 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Memberi suap. | KUHP 209 – 210 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Sumpah palsu dan keterangan palsu. | KUHP 242 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pemalsuan materai. | KUHP 253 – 262 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Pemalsuan surat. | KUHP 263 – 276 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | Perzinahan. | KUHP 284 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Perkosaan. | KUHP 285 – 286 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Permainan judi. | KUHP 303 BIS |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Penghinaan. | KUHP 310 – 321 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Penculikan. | KUHP 328 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Perbuatan yang tidak menyenangkan. | KUHP 335 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Kejahatan terhadap jiwa orang/pembunuhan. | KUHP 338 – 350 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | Penganiayaan berat. | KUHP 354 – 355 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Mengakibatkan orang mati. | KUHP 359 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Mengakibatkan orang luka. | KUHP 360 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | Pencurian biasa. | KUHP 362 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pencurian dengan pemberatan. | KUHP 363 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Pencurian ringan. | KUHP 364 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pencurian dengan kekerasan. | KUHP 365 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Pemerasan dan pengancaman. | KUHP 368 – 371 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Penggelapan. | KUHP 372 – 377 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | Penipuan/perbuatan curang. | KUHP 378 – 395 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Menghancurkan atau merusak barang. | KUHP 406 – 412 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | Menerima suap. | KUHP 418 – 420 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | Penadahan. | KUHP 480 – 482 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | Mempekerjakan anak di bawah umur. | UU NO. 23 / 2002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kekerasan dalam rumah tangga. | UU NO. TTG KDRT |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Penyalahgunaan senjata api/bahan peledak. | UU NO. 12/DRT/1951 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | Kejahatan narkoba (dalam negeri/lokal). | UU NO. 22/1997 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | Kejahatan psikotropika (dalam negeri/lokal). | UU NO. 5/1997 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Terorisme (dalam negeri/lokal). | UU NO. 15/2000 |

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal) | KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i> (Dalam Negeri/Lokal) | UU NO. 21/2007 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Pernikahan di Bawah Umur | UU NO. 1/1974 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | HAKI | UU NO. 14/1991, 15/2001 DAN 19/2002 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | Pencucian Uang/ <i>Money Laundry</i> (Dalam Negeri/Lokal) | UU NO. 5/2003 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i> (Dalam Negeri/Lokal) | UU NO. 11/2008 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | Kejahatan Pasar Modal | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | Kejahatan Konvensional Lainnya | |

2. Kejahatan Trans Nasional.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN TRANS NASIONAL (LINTAS NEGARA) | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Narkotika | UU NO.22/1997 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Psikotropika | UU NO. 5/1997 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Terorisme | UU NO. 15/2000 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Perompakan/Pembajakan | KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i> | UU NO. 21/2007 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | Pencucian Uang/ <i>Money Laundry</i> | UU NO. 5/2003 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i> | UU NO. 11/2008 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | Penyelundupan Senjata Api/ <i>Arm Smugling</i> | UU NO. 12/DRT/1951 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/ <i>Trans Economy Crime</i> | SESUAI KEJAHATANNYA |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kejahatan Trans Nasional Lainnya | |

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Korupsi | UU NO.31/1999 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Illegal Logging | UU NO.5/1967 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Illegal Fishing | UU NO.9/1985 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Illegal Mining | UU NO. 11 /1967 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lingkungan Hidup | UU NO.23/1997 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fiskal | UU NO. 16, 17, 18, 19, 20/2000 |

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | BBM Ilegal | UU NO. 22 / 2001 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Penyelundupan | UU NO. 10 / 1995 DAN 17 / 2008 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | Cukai | UU NO. 1/1995 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Telekomunikasi | UU NO.3/1989 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Karantina | UU NO.16/1992 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | KUHP 244 – 252 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya | |

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Separatisme | KUHP 104 - 129 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Terhadap Keamanan Negara/Makar | KUHP 104 - 129 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres | KUHP 131 - 139 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | Konflik Oknum TNI-Polri/Konflik Aparat | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bentrok Massa | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pemogokan Buruh | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | Unjuk Rasa Anarkis | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | Perkelahian Pelajar/Mahasiswa | Sesuai Kejahatannya |
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi Lainnya | |

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pelanggaran HAM Berat (Genocide) | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pembunuhan (Sistematis dan Meluas) | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pemusnahan (Sistematis dan Meluas) | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pengusiran atau Pindahan Penduduk Secara Paksa | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang yang Melanggar Ketentuan Pokok Hukum Internasional | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Penyiksaan (Sistematis dan Meluas) | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Perkosaan, Perbudakan seksual, Pelacuran Secara Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemandulan atau Sterilisasi Secara Paksa Dalam Bentuk Kekerasan Seksual yang Setara | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Penganiayaan Terhadap Suatu Kelompok Tertentu atau Perkumpulan yang Didasari Persamaan Paham Politik, Ras, Kebangsaan, Etnis, Budaya, Agama, Jenis Kelamin atau Alasan Lain yang Telah Diakui Secara Universal Sebagai Hal yang Dilarang Menurut Hukum Internasional | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Penghilangan Orang Secara Paksa | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kejahatan Apartheid | UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | <i>Torture</i> (Penganiayaan oleh Aparat) | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pelanggaran Dalam Hal Penyampaian Pendapat di Muka Umum | UU NO. 9/1998 |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | UU NO.23/2004 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Pelanggaran HAM Terhadap Anak | UU NO. 23/2002 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Pelanggaran HAM lainnya | |

Golongan II Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan).

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mengganggu ketenteraman dengan memberikan teriakan isyarat palsu | Pasal 172 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Mengganggu rapat umum | Pasal 174 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Membuat gaduh pertemuan Agama | Pasal 176 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Tentang merintang jalan | Pasal 178 KHUP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri | Pasal 217 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Merusak surat maklumat. | Pasal 219 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kealpaan hingga barang sitaan hilang atau rusak. | Pasal 231(4) KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel). | Pasal 232 (3) KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | Penganiayaan terhadap binatang sengaja membuat sakit, cacat, merusak kesehatan. | Pasal 302 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Membawa hewan dengan pas lain | Pasal 241 (2) KUHP |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Penghinaan Ringan | Pasal 315 KUHP |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Penghinaan dengan tulisan. | Pasal 321 (1) KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Karena salahnya orang menjadi tertahan. | Pasal 334 (1) KUHP |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Penganiayaan Ringan. | Pasal 352 (1) KUHP |

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | Pencurian Ringan. | Pasal 364 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | Penggelapan Ringan. | Pasal 373 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | Penipuan Ringan. | Pasal 379 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | Penipuan terhadap pembeli. | Pasal 384 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | Perusakan ringan. | Pasal 407 (1) KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Karena salahnya merusak pekerjaan. | Pasal 409 KUHP |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Kenakalan terhadap orang atau barang. | Pasal 489 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Meninggalkan kewajibannya untuk menjaga orang gila atau anak-anak sehingga membahayakan orang gila dan anak-anak tersebut | Pasal 491 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | Mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban. | Pasal 492 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | Dengan melawan hak merintangi kemerdekaan bergerak di jalan umum (merintangi kawannya untuk diajak mogok) | Pasal 494 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menyusahkan dan mendatangkan bahaya lalu lintas di jalan umum | Pasal 495 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | Tanpa izin dari Polri memasang perangkat binatang buas yang dapat membahayakan orang | Pasal 496 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | Tanpa izin Polri, membakar gedung/rumah sendiri | Pasal 497 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | Memasang api ditepi jalan umum atau dekat rumah yang dapat mendatangkan bahaya kebakaran atau kecelakaan. | Pasal 501 KUHP |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Menjual, menawarkan makanan/minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan. | Pasal 503 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | Membuat riuh atau ingar pada waktu malam membuat orang tidur terganggu. Membuat riuh waktu ada ibadah atau sidang Pengadilan. | Pasal 504 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | Minta-minta atau mengemis di tempat umum. | Pasal 505 (1) KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gelandangan / tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana. | Pasal 507 KUHP |
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Tidak berhak memakai gelar bangsawan, bintang atau tanda kehormatan Negara RI Memberitahukan nama palsu waktu ditanya oleh pembesar yang berhak (cq. Polri). | Pasal 508 bis KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | Di tempat umum tidak berhak memakai pakaian Pegawai Negeri. | Pasal 510 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | Tanpa izin Polri (Pegawai Negeri yang berhak), mengadakan pesta umum dan pawai di jalan umum. | Pasal 511 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | Tidak menurut perintah petunjuk Polri pada waktu ada pesta/arakan di jalan umum. | Pasal 512 (a) KUHP |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | Sebagai mata pencaharian menjalankan pekerjaan dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin dan dalam keadaan yang tidak memaksa | Pasal 515 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | Lalai tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atas kepindahannya. Lalai tidak memberi tahu kepada Kepala Desa setelah 14 hari tinggal di daerah tersebut. | Pasal 516 KUHP |

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Losmen, hotel penginapan yang pemiliknya : (a) Tidak mengadakan buku tamu. (b) Lalai tidak melaporkan/memperlihatkan buku tamu kepada Polri. | Pasal 522 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | Tidak datang setelah dipanggil menurut Undang-Undang, untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa. | Pasal 525 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | Tidak memberikan pertolongan yang diminta kuasa hukum (c.q. Polri) terhadap bahaya bagi keamanan umum/barang atau orang sedang berbuat kejahatan sedangkan pertolongan itu tidak membahayakan dirinya. | Pasal 531 KUHP |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | Tidak memberikan pertolongan terhadap orang di dalam keadaan bahaya maut, sedangkan pertolongan tersebut tidak membahayakan dirinya. | Pasal 532 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | Dimuka umum: menyanyikan lagu-lagu, pidato, mengadakan gambar/tulisan yang melanggar kesopanan. | Pasal 536 KUHP |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | Nyata mabuk/kentara mabuk di jalan umum. | Pasal 540 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | Memakai binatang untuk pekerjaan yang terlampau berat. Memakai binatang yang cacat, pincang, luka, hamil untuk pekerjaan sesuatu dengan keadaannya. | Pasal 546 KUHP |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | Menjual, menawarkan, membagikan menyerahkan benda jimat/penangkal dengan dalih benda tersebut ada kesaktiannya. Mengajarkan ilmu/kepandaian sehingga menimbulkan kepercayaan terhindar dari bahaya apabila melakukan tindak pidana. | Pasal 548 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | Membiarkan ternaknya yang bersayap berjalan di tanah yang sudah ditaburi/ditanami dengan melawan hak. | Pasal 549 KUHP |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | Dengan tiada berhak membiarkan ternaknya berjalan ditanah yang sudah ditaburi/ditanami. | Pasal 525 KUHP |

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan Lainnya).

| NOMOR | | | | | | | PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN) | KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Berjualan di atas jalan umum atau trotoar. | Perda |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Meminta-minta di jalan umum. | Perda |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bangunan tanpa izin. | Perda |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rumah makan/restoran tanpa izin. | Perda |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Tempat hiburan tanpa izin. | Perda |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Pelanggaran hukum non pidana lainnya. | Perda |

Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP ORANG | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Penemuan mayat. | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bunuh diri. | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Orang hilang. | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kecelakaan. | |
| 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Membunyikan audio berlebihan/keras/bising. | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Gangguan terhadap orang lainnya. | |

2. Gangguan Terhadap Barang.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP BARANG | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kebakaran | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kehilangan | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kecelakaan | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gangguan Terhadap Barang Lainnya | |

3. Gangguan Terhadap Hewan.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP HEWAN | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Meracuni hewan peliharaan/dilindungi | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Menyiksa hewan peliharaan/dilindungi | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mengadu/menyabung hewan | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gangguan Terhadap Hewan Lainnya | |

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Membakar sampah berlebihan | |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Merokok di tempat umum | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Buang air besar/kecil tidak pada tempatnya | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup Lainnya | |

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Memindahkan/mengubah rambu lalu lintas tanpa hak | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Memblokir jalan umum | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Membuka irigasi tanpa hak | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Menggangu frekuensi radio | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gangguan terhadap sarana dan fasilitas lainnya. | |

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

| NOMOR | | | | | | | BENCANA ALAM | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gempa bumi. | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tsunami . | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gunung meletus. | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Banjir bandang. | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Banjir pasang (Rob). | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Tanah longsor. | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kebakaran hutan. | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | Bencana alam lainnya. | |

2. Bencana Non Alam

| NOMOR | | | | | | | BENCANA NON ALAM | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kebakaran. | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kebocoran reaktor nuklir. | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | Banjir. | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bencana non alam lainnya. | |

3. Bencana Sosial.

| NOMOR | | | | | | | BENCANA SOSIAL | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Epidemi penyakit. | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kelangkaan BBM. | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat. | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | HO/Busung Lapar. | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Gagal panen. | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bencana sosial lainnya. | |

LAPORAN INSIDENTIL

1. Laporan Segera.

KOP KESATUAN

LAPORAN SEGERA
NO. POL. :

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | JENIS GANGGUAN KAMTIBMAS | |
| 2. | WAKTU : a. Waktu Kejadian. b. Waktu Dilaporkan c. Waktu Mendatangi TKP | |
| 3. | TEMPAT KEJADIAN | |
| 4. | MODUS OPERANDI | |
| 5. | KORBAN | |
| 6. | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | |
| 7. | PELAKU | |
| 8. | SANKSI-SANKSI | |
| 9. | MOTIF | |
| 10. | ALAT YANG DIGUNAKAN | |
| 11. | KERUGIAN | |
| 12. | BUKTI YANG DAPAT DISITA | |
| 13. | KESATUAN YANG MENANGANI | |
| 14. | TINDAKAN KEPOLISIAN | |
| 15. | KETERANGAN LAIN | |

Penjelasan : Minimal terisi nomor urut 1 s.d. 5

Jakarta,

PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN

Kepada : Yth.

Tembusan :

1.
2. dst.

2. Laporan Kemajuan.

KOP KESATUANLAPORAN KEMAJUAN
NO. POL. :

| | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | DASAR | |
| 2. | PERKARA/PERISTIWA | |
| 3. | WAKTU | |
| 4. | TEMPAT KEJADIAN | |
| 5. | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | |
| 6. | FAKTA-FAKTA : | |
| | KETERANGAN SAKSI-SAKSI : | |
| | a. | |
| | b. dst | |
| | BARANG BUKTI YANG DISITA : | |
| | a. | |
| | b. . . . dst | |
| 7. | PENANGKAPAN TERSANGKA (PELAKU) | |
| 8. | KETERANGAN TERSANGKA | |
| 9. | MODUS OPERANDI | |
| 10. | MOTIF | |
| 11. | ALAT YANG DIGUNAKAN | |
| 12. | KERUGIAN | |
| 13. | KESATUAN YANG MENANGANI | |

Penjelasan : Diisi secara singkat tapi jelas.

Jakarta,

PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN

Kepada : Yth.

Tembusan :

1.
2. dst.

LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK).Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional.

| NOMOR | | | | | | | | KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|---------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

2. Kejahatan Trans Nasional

| NOMOR | | | | | | | | KEJAHATAN TRANS NASIONAL | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|--------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

| NOMOR | | | | | | | | KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|------------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

| NOMOR | | | | | | | | KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|------------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

5. Pelanggaran HAM.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN HAM | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

Golongan II Pelanggaran.

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan lainnya).

| NOMOR | | | | | | | PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA) | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

Golongan III Gangguan Terhadap Ketentraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP ORANG | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

2. Gangguan Terhadap Barang.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP BARANG/HEWAN | JUMLAH |
|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| | | | | | | | JUMLAH | |

3. Gangguan Terhadap Hewan.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP HEWAN | JUMLAH |
|-------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| | | | | | | | JUMLAH | |

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP | JUMLAH |
|-------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| | | | | | | | JUMLAH | |

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS | JUMLAH |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | |
| | | | | | | | JUMLAH | |

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

| NOMOR | | | | | | | | BENCANA ALAM | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|--------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

2. Bencana Non Alam.

| NOMOR | | | | | | | | BENCANA NON ALAM | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|------------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

3. Bencana Sosial.

| NOMOR | | | | | | | | BENCANA SOSIAL | JUMLAH |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|----------------|--------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

Cara pengisian format LHGK :

1. Kolom satu berisikan nomor kode Gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis Gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.

LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK).Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional/Nasional.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL | LAPOR | SELESAI |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | |

2. Kejahatan Trans Nasional

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN TRANS NASIONAL | LAPOR | SELESAI |
|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | |

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA | LAPOR | SELESAI |
|-------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | |

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

| NOMOR | | | | | | | KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

5. Pelanggaran HAM

| NOMOR | | | | | | | PELANGGARAN HAM | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

Golongan II Pelanggaran Hukum.

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

| NOMOR | | | | | | | PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN) | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|--|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan Lainnya).

| NOMOR | | | | | | | PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA) | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

| NOMOR | | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP ORANG | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | dll | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | |

2. Gangguan Terhadap Barang.

| NOMOR | | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP BARANG | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | |

3. Gangguan Terhadap Hewan.

| NOMOR | | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP HEWAN | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | |

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

| NOMOR | | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|-------|---------|
| 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | |

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

| NOMOR | | | | | | | GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS | LAPOR | SELESAI |
|--------|---|---|---|---|---|---|--|-------|---------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

Cara pengisian format LMGK :

1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
4. Kolom empat diisi penyelesaian perkara/kejadian sesuai ketentuan yang berlaku.

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

| NOMOR | | | | | | | BENCANA ALAM | KEJADIAN | KERUGIAN | KORBAN | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------|----------|--------|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | |

2. Bencana Non Alam.

| NOMOR | | | | | | | BENCANA ALAM | KEJADIAN | KERUGIAN | KORBAN | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------|----------|--------|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | |

3. Bencana Sosial.

| NOMOR | | | | | | | BENCANA SOSIAL | KEJADIAN | KERUGIAN | KORBAN | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|----------------|----------|----------|--------|----|----|
| | | | | | | | | | | MD | LB | LR |
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Dst. | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | |

Cara pengisian format LMGK (khusus golongan bencana):

1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
4. Kolom empat diisi jumlah kerugian yang dialami, ditaksir dalam rupiah.
5. Kolom 5,6,7 diisi jumlah korban manusia yang meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR).

REKAPITULASI PERISTIWA/KEJADIAN KEJAHATAN :

| NO | JENIS KEJAHATAN | LAPOR | | | PENYELESAIAN | | | | | | | SISA | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|------|------------------|------------------|------|----|
| | | JMLH PERKARA BLN INI | TUNG GAKAN | JMLH P 21 | PENYIDIKAN DIHENTIKAN | | | | | | | JMLH | D.M PROSES LIDIK | DLM PROSES SIDIK | JMLH | |
| | | | | | TDK CUKUP BUKTI | BUKAN PKR PIDANA | ADUAN DICABUT | NEBIS IN IDEM | TSK MATI | TSK GILA | KADA LUARSA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | |

Cara pengisian format GK Golongan Kejahatan :

1. Di kiri atas diisi dengan kcp kesatuan (Polres/TA/TABES , Powil/Wittabas, Polda, Mabes Polri), yang menyusun laporan.
2. Di tengah di bawah format GK dicantumkan bulan dan tahun laporan dibuat
3. Kolom 1 dan 2 sudah terisi sesuai blanko format GK
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah perkara
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah tunggakan perkara yang belum selesai pada bulan lalu
6. Kolom 5 diisi dengan berkas perkara yang dikirim ke PU
7. Kolom 6 diisi apabila berkas perkara yang dikirim ke PU dinyatakan sudah lengkap (P21)
8. Kolom 7 diisi apabila perkara dihentikan karena tidak cukup bukti
9. Kolom 8 diisi jumlah perkara yang dihentikan karena bukan perkara pidana
10. Kolom 9 diisi apabila perkara dicabut atas permintaan pelapor
11. Kolom 10 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena Nebis In Idem.
12. Kolom 11 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka/pelaku meninggal dunia
13. Kolom 12 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka hilang ingatan/gila
14. Kolom 13 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena perkaranya sudah kadaluwarsa
15. Kolom 14 diisi jumlah dari kolom 6 sid kolom 13
16. Kolom 15 diisi dengan jumlah perkara yang masih dalam proses penyelidikan/penyidikan
17. Kolom 16 diisi jumlah berkas perkara yang dikembalikan oleh PU
18. Kolom 17 diisi jumlah dari kolom 15 dan kolom 16

LAMPIRAN V.c.

C. LAPORAN BULANAN GANGGUAN KETENTRAMAN/KETERTIBAN

1. Gangguan Terhadap Orang:

| NO | JENIS GANGGUAN TERHADAP ORANG | LAPOR | | SELESAI |
|------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| | | LAPORAN MASYARAKAT 3 | DITEMUKAN PETUGAS POLRI 4 | |
| 1 | | | | 5 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst. | | | | |
| | | JUMLAH | | |

2. Gangguan Terhadap Barang:

| NO | JENIS GANGGUAN TERHADAP BARANG | LAPOR | SELESAI | KERUGIAN |
|------|--------------------------------|--------|---------|----------|
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst. | | | | |
| | | JUMLAH | | |

29

3. Gangguan Terhadap Hewan

| NO | JENIS GANGGUAN TERHADAP HEWAN | LAPOR | SELESAI |
|--------|-------------------------------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Dst. | | | |
| JUMLAH | | | |

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

| NO | JENIS GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP | LAPOR | SELESAI |
|--------|--|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Dst. | | | |
| JUMLAH | | | |

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

| NO | JENIS GANGGUAN | LAPOR | SELESAI | KERUGIAN (RP) |
|--------|----------------|-------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Dst. | | | | |
| JUMLAH | | | | |

LAMPIRAN V.d.

D. LAPORAN BULANAN KEJADIAN BENCANA

1. Bencana Alam.

| NO | BENCANA ALAM | JMLH KEJADIAN | JMLH KORBAN | | | KERUGIAN (RP) |
|--------|--------------|---------------|-------------|----|----|---------------|
| | | | MD | LB | LR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

2. Bencana Non Alam.

| NO | BENCANA NON ALAM | JMLH KEJADIAN | JMLH KORBAN | | | KERUGIAN (RP) |
|--------|------------------|---------------|-------------|----|----|---------------|
| | | | MD | LB | LR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

3. Bencana Sosial.

| NO | BENCANA SOSIAL | JMLH KEJADIAN | JMLH KORBAN | | | KERUGIAN (RP) |
|--------|----------------|---------------|-------------|----|----|---------------|
| | | | MD | LB | LR | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dst. | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

LAMPIRAN V.e.

LAMPIRAN V.e.

E. LAPORAN BULANAN KECELAKAAN DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

PERIODE : BULAN

MABES POLRI
 POLDA
 POLWIL/MILTABES
 POLRES/RESTA/TABES

| NO | JENIS KEJADIAN | JUMLAH YANG DI LAPORKAN | AJUKAN KE PU/PN | | KORBAN | | | KERUGIAN | | PROFESI PELAKU | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------|----|----|----------|-----|----------------|------------|------------|-----------|
| | | | SUDAH | BELUM | MD | LB | LR | MATERIL | TNI | PEG. NEGERI | PENGENMUDI | MHSW/ PLJR | LAIN-LAIN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | KECELAKAAN LALU LINTAS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TABRAK LARI | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PELANGGARAN LALU LINTAS | | | | | | | | | | | | |

Urutk harian : Periode diganti Hari
 Minggu ke... : Periode Minggu ke... tgl. sid

KETERANGAN :

1. JUMLAH YANG DILAPORKAN HARUS SESUAI DENGAN JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN DAN PELANGGARAN YANG DITINDAK DAN SESUAI DENGAN FORMAT LAPORAN BULANAN FUNGSI LANTAS.
2. JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAPORKAN (KCLM 1) ADALAH SELURUH JUMLAH KEJADIAN LAKA LANTAS, TERMASUK TABRAK LARI

KA KESATUAN LANTAS

Cara Pencisian Format Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas.

1. Sebelah kiri atas diisi dengan Kop Kesatuan
2. Bagian tengah atas diisi dengan bulan dan tahun pembuatan laporan.
3. Kolom 1 dan 2, sudah terisi sesuai dengan blanko format.
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah kasus yang di laporkan.
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah berkas perkara yang telah dikirim/dijjukan ke PU/PN.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah berkas perkara yang belum dikirim masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kejadian, baik di TKP maupun di RS sebelum laporan dibuat.
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah korban luka berat akibat kejadian.
9. Kolom 8 diisi dengan jumlah berkas perkara korban luka ringan akibat kejadian.
10. Kolom 9 diisi dengan jumlah kerugian yang diderita akibat kejadian diukur dalam rupiah.
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai anggota TNI.
12. Kolom 11 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri.
13. Kolom 12 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi.
14. Kolom 13 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar
15. Kolom 14 diisi jumlah pelaku yang berprofesi di luar dari kolom 10 s.d 13.
16. Untuk pengisian format data dan informasi diapatkan dari Satuan Lalu Lintas.
17. Laporan di tingkat Polres/Resta/Tabes, Polwil/Wiltabes data DTO Kasat Lantas. di tingkat Polda Dir Lantas Polda dan di Mabes Polri.

LAMPIRAN V.f.

F. LAPORAN BULANAN TAHANAN

PERIODE : BULAN

MABES POLRI :
 POLDA :
 POLWIL/WILTABES :
 POLRES/RESTA/TABES :

| TANGGAL | SSA | MASUK | KELUAR | JUMLAH | URAIAN | | | | | | PROVOS | KET |
|---------|-----|-------|--------|--------|--------|---|-----------|---|----|----|--------|-----|
| | | | | | DEWASA | | ANAK-ANAK | | L | P | | |
| | | | | | L | P | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | |

- Untuk harian : Periode diganti Hari
 - Minggu : Periode Minggu ke... tgl s/d

Cara Pengisian Format Date Tahanan.

1. Sebelah kiri atas diisi dengan Kop Kesatuan.
2. Bagian tengah atas diisi dengan bulan dan tahun pembuatan.
3. Kolom 1 : merupakan tanggal dari bulan pembuatan laporan.
4. Kolom 2 : diisi jumlah tahanan yang diambil dari laporan terakhir pada pukul 18.00 hari sebelumnya.
5. Kolom 3 : diisi jumlah tahanan yang masuk pada hari laporan, berakhir pada pukul 18.00.
6. Kolom 4 : diisi jumlah tahanan yang dikeluarkan dari Rutan pada hari laporan.
7. Kolom 5 : diisi jumlah akhir tahanan untuk hari laporan terakhir pada pukul 18.00 (kolom 2 ditambah kolom 3 dikurangi kolom 4).
8. Kolom 6 s.d 9 : diisi jumlah tahanan disesuaikan dengan jenis kelamin.
9. Kolom 10 : diisi jumlah tahanan yang menjadi tanggung jawab Provos, yang berprofesi sebagai anggota Polri.
10. Kolom 11 : Keterangan, bila diperlukan

LAMPIRAN VI

PENGOLAHAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS.

1. Perhitungan persentase perkembangan jumlah kejahatan dalam periode tertentu.
 Persentase kenaikan atau penurunan jumlah kejahatan dalam periode tertentu (X) dibandingkan dengan periode sebelumnya (Y) dalam kurun waktu yang sama.
 Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{X - Y}{Y} \times 100 \%$$

Contoh :

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus (X).

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2006 = 205.678 kasus (Y).

Hasil Perhitungan :

$$\frac{218.539 - 205.678}{205.678} \times 100 \% = 6,25 \%$$

Artinya adalah bahwa perkembangan jumlah gangguan Kamtibmas pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,25 % dibandingkan dengan tahun 2006.

2. Perhitungan Persentase Penyelesaian Perkara Kejahatan.

Jumlah kejahatan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan..

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kasus yang diselesaikan}}{\text{Kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Contoh :

1) Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus.

2) Jumlah kasus yang diselesaikan dalam tahun 2007 = 125.496 kasus.

Hasil Perhitungan :

$$\frac{125.496}{218.539} \times 100 \% = 57,42 \%$$

Artinya adalah bahwa kemampuan penyelesaian perkara tindak pidana dalam tahun 2007 sebesar 57,42 % .

3. Perhitungan Resiko Penduduk Terkena Perkara Kejahatan (Tindak Pidana),
Jumlah kejahatan yang terjadi dibanding dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah dengan rata-rata per 100.000 penduduk.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Pidana}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000 =$$

Contoh :

Jumlah peristiwa tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2007 ada 245.712 kasus.
Jumlah penduduk Indonesia : 220.000.000.

Perhitungan resiko terkena perkara kejahatan per 100.000 penduduk.

$$\frac{245.712}{220.000.000} \times 100.000 = 116$$

Artinya adalah bahwa rata-rata setiap 100.000 penduduk beresiko menjadi korban perkara kejahatan (tindak pidana) sebanyak 116 orang.

4. Perhitungan Persentase Jumlah Kejahatan Meresahkan.
Jumlah kejahatan tertentu yang dijadikan ukuran kerawanan suatu daerah dibanding dengan jumlah semua kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu,

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kejahatan Meresahkan}}{\text{Jumlah Kejahatan Secara Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Contoh :

Jumlah kejahatan yang meresahkan tahun 2007 = 105.455 kasus
Jumlah tindak pidana secara keseluruhan tahun 2007 = 218.539 kasus

Hasil Perhitungan :

$$\frac{105.455}{218.539} \times 100 \% = 48,25 \%$$

Artinya jumlah tindak pidana yang meresahkan masyarakat sebesar 48,25 % dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi dalam tahun 2007

5. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.

Perhitungan perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah waktu dalam detik.

Rumus perhitungan dalam kurun waktu satu tahun :

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ (detik)}}{\text{Jumlah Tindak Pidana}}$$

Contoh :

Jumlah kejahatan diseluruh Indonesia tahun 2007 = 236.997 kasus.

Hasil Perhitungannya :

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{236.997} = 2 \text{ ' } 13''$$

Artinya adalah bahwa dalam tahun 2007, rata-rata setiap 2 menit 13 detik terjadi 1 (satu) perkara kejahatan di Indonesia.

6. Perbandingan Jumlah Polisi dengan Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk dibanding dengan jumlah Polisi dalam suatu daerah.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Polisi}}$$

Contoh Perhitungan perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri :

1) Jumlah anggota Polri seluruh Indonesia pada tahun 2007 : 360.000 anggota.

2) Jumlah penduduk Indonesia tahun 2007 : 220.000.000 jiwa.

Perhitungan :

$$\frac{220.000.000}{360.000} = 611$$

Artinya adalah bahwa untuk setiap 1 orang anggota Polri melayani 611 orang penduduk.

PENYAJIAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS

1. Jumlah Kejahatan, Penyelesaian Kejahatan dan Persentase Penyelesaian Kejahatan.

a. Dalam Bentuk Tabel.

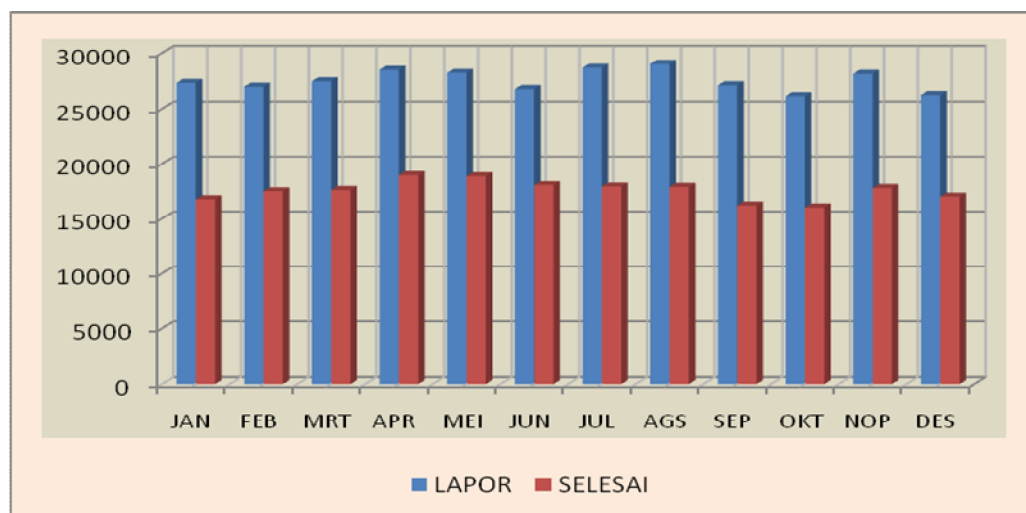
Contoh :

DATA REKAPITULASI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN
PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA

| NO | BULAN | JML GK | SELESAI | % |
|----|-----------|---------|---------|-------|
| 1 | JANUARI | 27.300 | 16.758 | 61,38 |
| 2 | FEBRUARI | 26.960 | 17.490 | 64,87 |
| 3 | MARET | 27.446 | 17.602 | 64,13 |
| 4 | APRIL | 28.468 | 18.957 | 66,59 |
| 5 | MEI | 28.192 | 18.852 | 66,87 |
| 6 | JUNI | 26.752 | 18.053 | 67,48 |
| 7 | JULI | 28.654 | 17.926 | 62,56 |
| 8 | AGUSTUS | 29.005 | 17.883 | 61,65 |
| 9 | SEPTEMBER | 27.083 | 16.204 | 59,83 |
| 10 | OKTOBER | 26.122 | 16.019 | 61,32 |
| 11 | NOVEMBER | 28.107 | 17.789 | 63,29 |
| 12 | DESEMBER | 26.220 | 17.008 | 64,87 |
| | JUMLAH | 330.309 | 210.541 | 63,74 |

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

GRAFIK PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS DAN
PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA

Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.

Sumber Data : Pusdalops Polri.

2. Resiko Penduduk Menjadi Korban Kejahatan.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

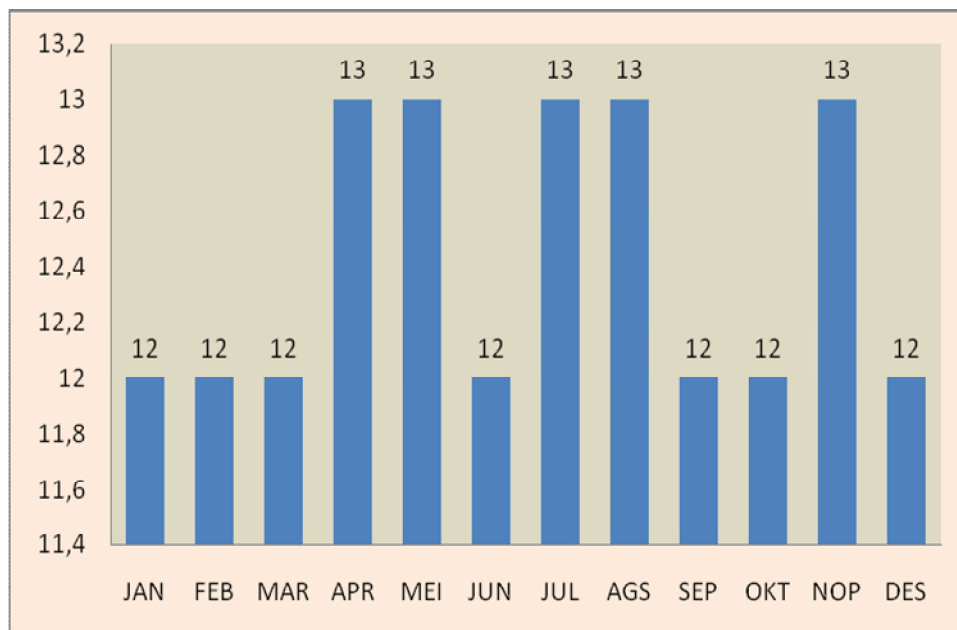
PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA

| NO | BULAN | JML TP | JML PDDK | RESIKO |
|----|-----------|---------|-------------|--------|
| 1 | JANUARI | 27.300 | 220.000.000 | 12 |
| 2 | FEBRUARI | 26.960 | 220.000.000 | 12 |
| 3 | MARET | 27.446 | 220.000.000 | 12 |
| 4 | APRIL | 28.468 | 220.000.000 | 13 |
| 5 | MEI | 28.192 | 220.000.000 | 13 |
| 6 | JUNI | 26.752 | 220.000.000 | 12 |
| 7 | JULI | 28.654 | 220.000.000 | 13 |
| 8 | AGUSTUS | 29.005 | 220.000.000 | 13 |
| 9 | SEPTEMBER | 27.083 | 220.000.000 | 12 |
| 10 | OKTOBER | 26.122 | 220.000.000 | 12 |
| 11 | NOVEMBER | 28.107 | 220.000.000 | 13 |
| 12 | DESEMBER | 26.220 | 220.000.000 | 12 |
| | RATA-RATA | 330.309 | 220.000.000 | 150 |

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

3.. Kejahatan Yang Meresahkan.

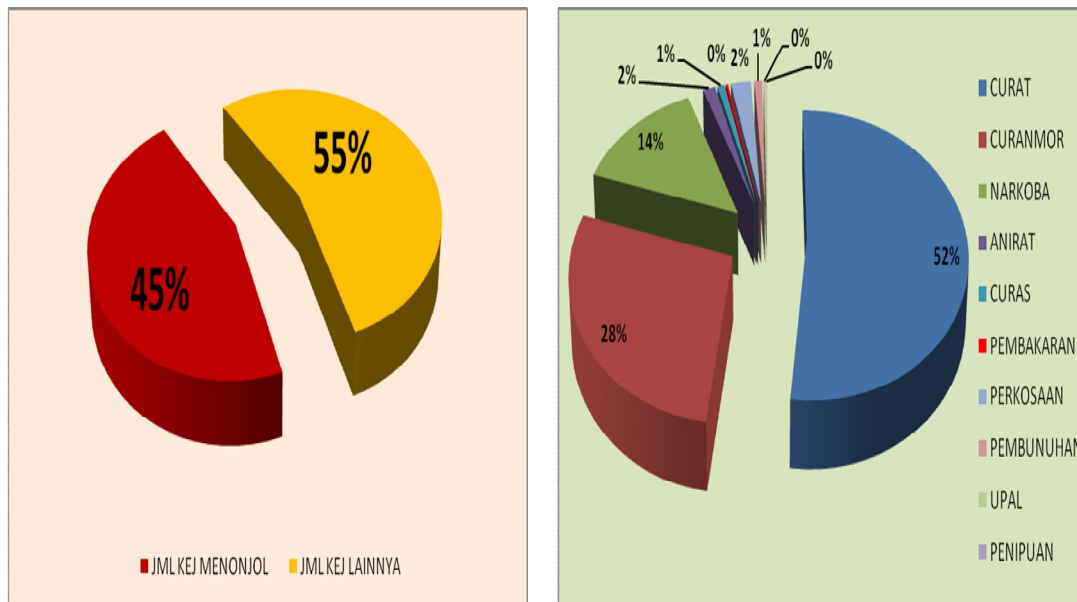
- a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA

| NO | JENIS KEJAHATAN | JUMLAH | % |
|-------------|----------------------|---------|-------|
| 1 | Pencurian Pemberatan | 61.162 | 42,25 |
| 2 | Pencurian Ranmor | 32.704 | 22,59 |
| 3 | Narkotika | 16.822 | 11,62 |
| 4 | Penganiayaan Berat | 16.630 | 11,48 |
| 5 | Pencurian Kekerasan | 9.770 | 6,74 |
| 6 | Kebakaran | 3.220 | 2,22 |
| 7 | Perkosaan | 2.696 | 1,86 |
| 8 | Pembunuhan | 1.068 | 0,95 |
| 9 | Uang Palsu | 331 | 0,22 |
| 10 | Penipuan | 46 | 0,03 |
| J U M L A H | | 144.449 | |

- b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.

Sumber Data : Pusdalops Polri.

4. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.

- a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

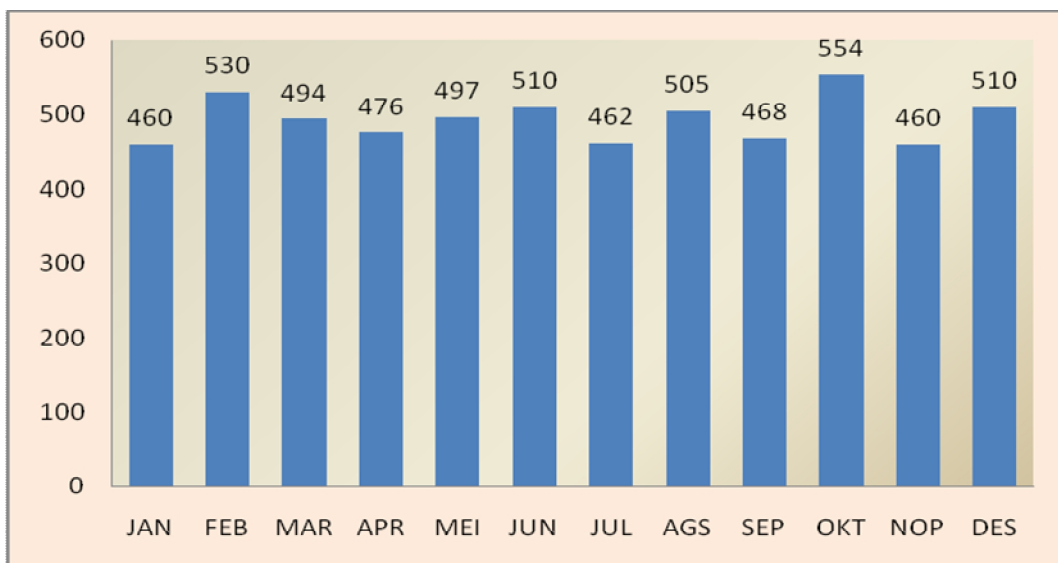
PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN
TH 2007 DI POLDA " X "

| NO | BULAN | JML GK TH 2007 | SELANG WAKTU | SELANG WAKTU DLM DETIK |
|--------|-----------|----------------|--------------|------------------------|
| 1 | JANUARI | 5.826 | 7' 40" | 460 |
| 2 | FEBRUARI | 4.561 | 8' 50" | 530 |
| 3 | MARET | 5.426 | 8' 14" | 494 |
| 4 | APRIL | 5.450 | 7' 56" | 476 |
| 5 | MEI | 5.385 | 8' 17" | 497 |
| 6 | JUNI | 5.085 | 8' 30" | 510 |
| 7 | JULI | 5.796 | 7' 42" | 462 |
| 8 | AGUSTUS | 5.300 | 8' 25" | 505 |
| 9 | SEPTEMBER | 5.534 | 7' 48" | 468 |
| 10 | OKTOBER | 4.837 | 9' 14" | 554 |
| 11 | NOVEMBER | 5.635 | 7' 40" | 460 |
| 12 | DESEMBER | 5.249 | 8' 30" | 510 |
| JUMLAH | | 64.084 | 8' 12" | 492 |

Artinya adalah bahwa RATA-RATA setiap 8 Menit 12 Detik terjadi satu tindak pidana di wilayah hukum Polda " X "

- b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN
TH 2007 DI POLDA " X "



Keterangan : Skala Waktu berdasarkan detik
Sumber Data : Pusdalops Polri.

5. Pola Kejahatan

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

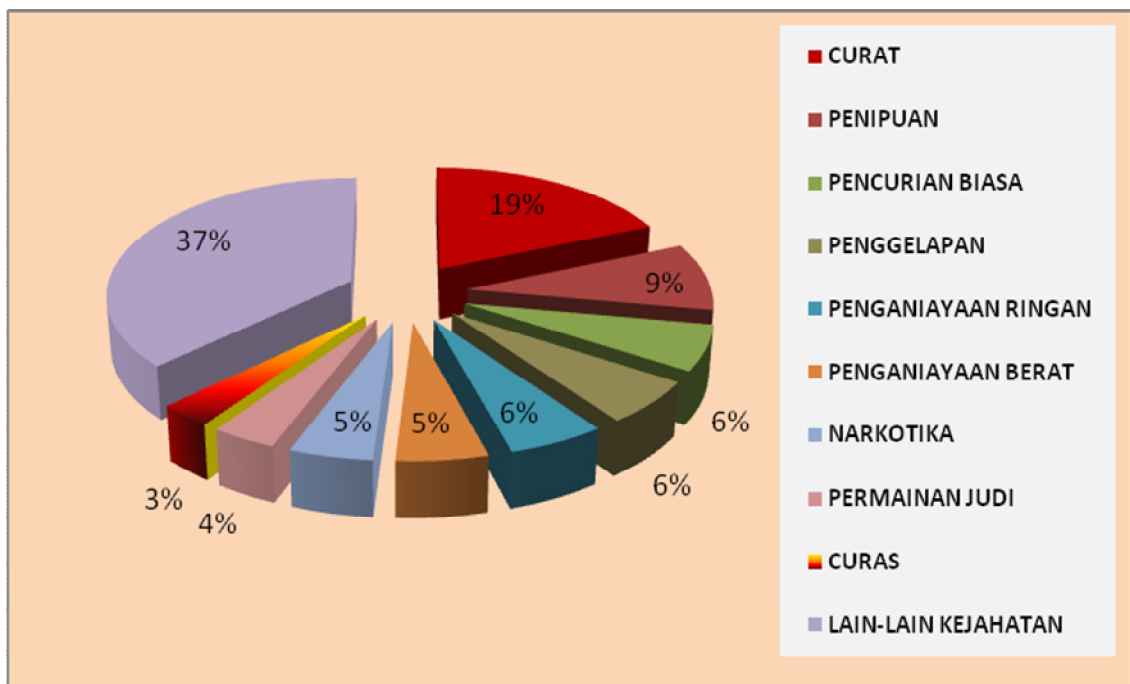
POLA KEJAHATAN TAHUN 2007

| NO | JENIS KEJAHATAN | JUMLAH KASUS | PERSENTASE |
|----|---------------------|--------------|------------|
| 1 | CURAT | 55.591 | 18,58 |
| 2 | PENIPUAN | 27.527 | 9,20 |
| 3 | PENCURIAN BIASA | 18.670 | 6,24 |
| 4 | PENGGELAPAN | 17.869 | 5,97 |
| 5 | PENGANIAYAAN RINGAN | 17.007 | 5,68 |
| 6 | PENGANIAYAAN BERAT | 16.014 | 5,35 |
| 7 | NARKOTIKA | 14.549 | 4,86 |
| 8 | PERMAINAN JUDI | 11.378 | 3,80 |
| 9 | CURAS | 9.491 | 3,17 |
| 10 | LAIN-LAIN KEJAHATAN | 111.009 | 37,11 |

Sumber Data : Pusdalops Polri.

b. Dalam Bentuk Grafik

Contoh :



Sumber Data : Pusdalops Polri.

6. Modus Operandi Kejahatan.

Modus operandi atau cara melakukan kejahatan / tindak pidana dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang modus operandi / cara-cara melakukan kejahatan tersebut.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

MODUS OPERANDI KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA

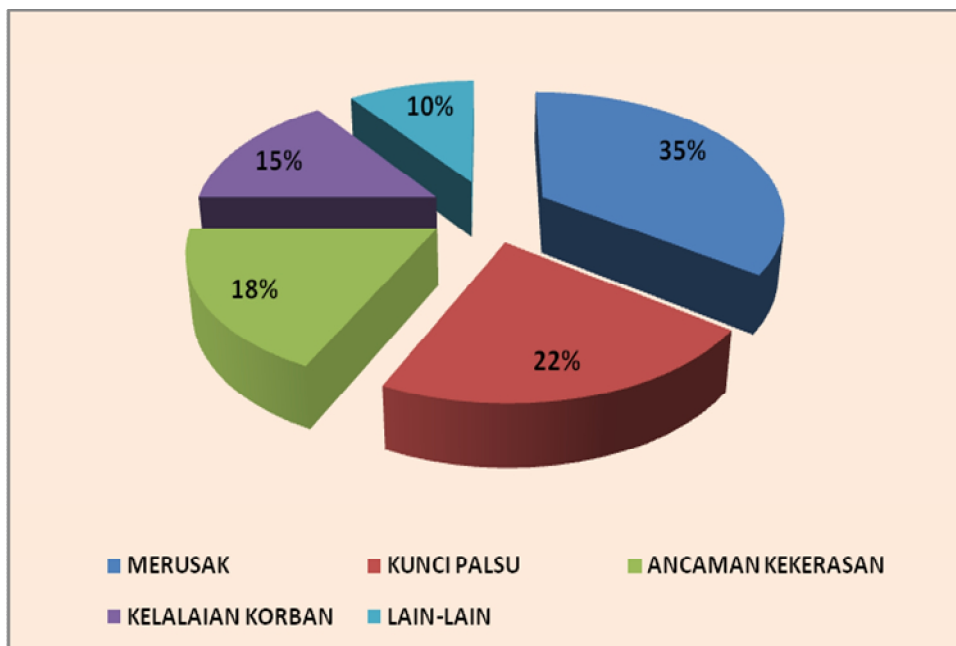
| NO | MODUS OPERANDI | JML KEJADIAN | % |
|----|-------------------|--------------|----|
| 1 | MERUSAK | 11.446 | 35 |
| 2 | KUNCI PALSU | 7.195 | 22 |
| 3 | ANCAMAN KEKERASAN | 5.887 | 18 |
| 4 | KELALAIAN KORBAN | 4.906 | 15 |
| 5 | LAIN-LAIN | 3.270 | 10 |
| | JUMLAH | 32.704 | |

Artinya adalah bahwa modus operandi terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah dengan cara merusak.

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

MODUS OPERANDI KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

7. Pola TKP Kejahatan.

Modus tempat kejadian perkara kejahatan dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola tempat kejadian perkara kejahatan tersebut.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA

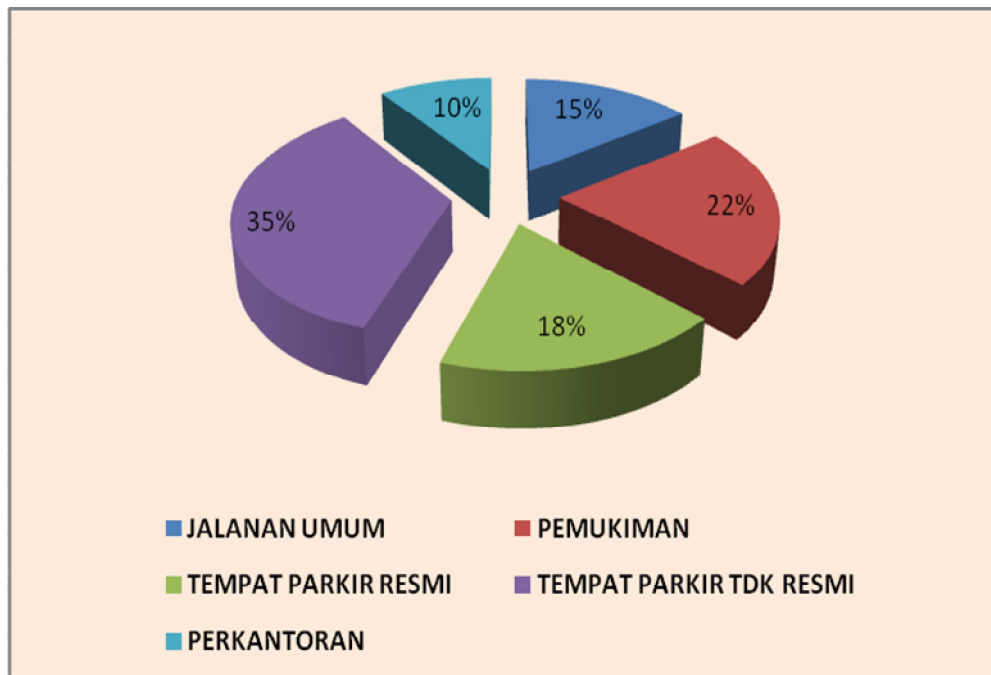
| NO | MODUS OPERANDI | JML KEJADIAN | % |
|----|-------------------------|--------------|----|
| 1 | JALANAN UMUM | 4.906 | 15 |
| 2 | PEMUKIMAN | 7.195 | 22 |
| 3 | TEMPAT PARKIR RESMI | 5.887 | 18 |
| 4 | TEMPAT PARKIR TDK RESMI | 11.446 | 35 |
| 6 | PERKANTORAN | 3.270 | 10 |
| | JUMLAH | 32.704 | |

Artinya adalah bahwa pola TKP terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah di tempat parkir tidak resmi.

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

8. Pola Waktu Terjadinya Kejahatan.

Modus waktu terjadinya kejahatan dapat dirinci menurut setiap jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola waktu kejadian kejahatan tersebut.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA

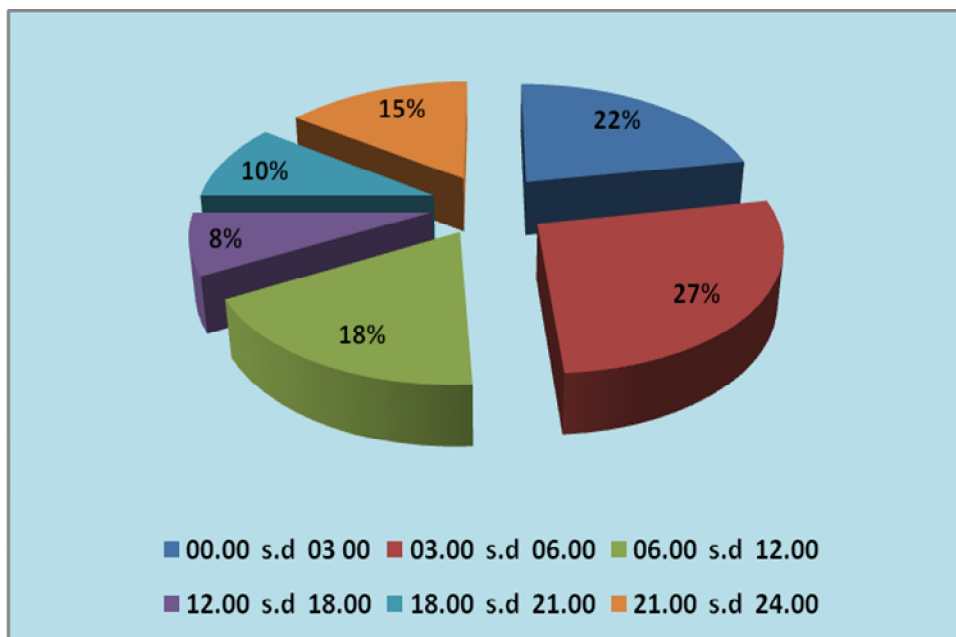
| NO | MODUS OPERANDI | JML KEJADIAN | % |
|----|------------------|--------------|----|
| 1 | 00.00 s.d. 03.00 | 7.195 | 22 |
| 2 | 03.00 s.d. 06.00 | 8.830 | 27 |
| 3 | 06.00 s.d. 12.00 | 5.887 | 18 |
| 4 | 12.00 s.d. 18.00 | 2.616 | 8 |
| 5 | 18.00 s.d. 21.00 | 3.270 | 10 |
| 6 | 21.00 s.d. 24.00 | 4.906 | 15 |
| | JUMLAH | 32.704 | |

Artinya adalah bahwa pola waktu terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah pada pukul 03 s.d. 06.00.

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

9. Kecelakaan Lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

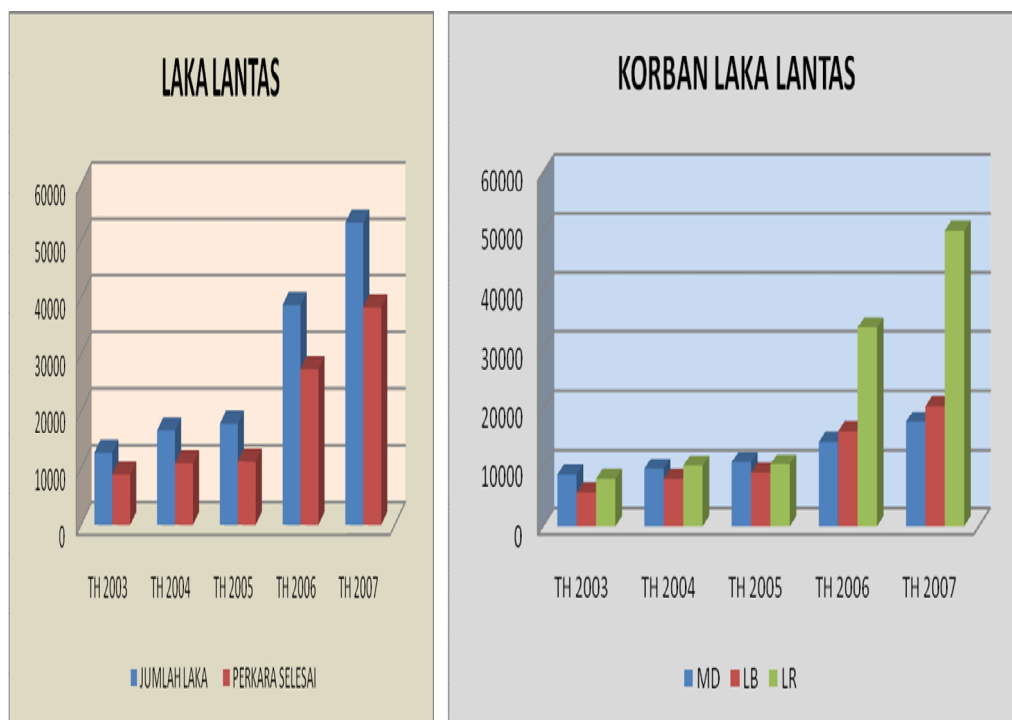
- a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

**KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**

| NO | PERIODE TAHUN | JUMLAH LAKA | SELRA | % | KORBAN | | |
|----|---------------|-------------|--------|----|--------|--------|--------|
| | | | | | MD | LB | LR |
| 1 | 2003 | 12.746 | 8.969 | 70 | 8.834 | 5.775 | 8.096 |
| 2 | 2004 | 16.761 | 10.913 | 65 | 9.872 | 8.080 | 10.356 |
| 3 | 2005 | 17.909 | 11.217 | 63 | 11.000 | 9.139 | 10.614 |
| 4 | 2006 | 38.830 | 27.475 | 71 | 14.419 | 16.182 | 33.729 |
| 5 | 2007 | 53.305 | 38.401 | 72 | 17.807 | 20.462 | 50.141 |

- 2) Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

**KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detilnya.

Sumber Data : Ditlantas Polri.

10. Pelanggaran Lalu lintas yang ditindak.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

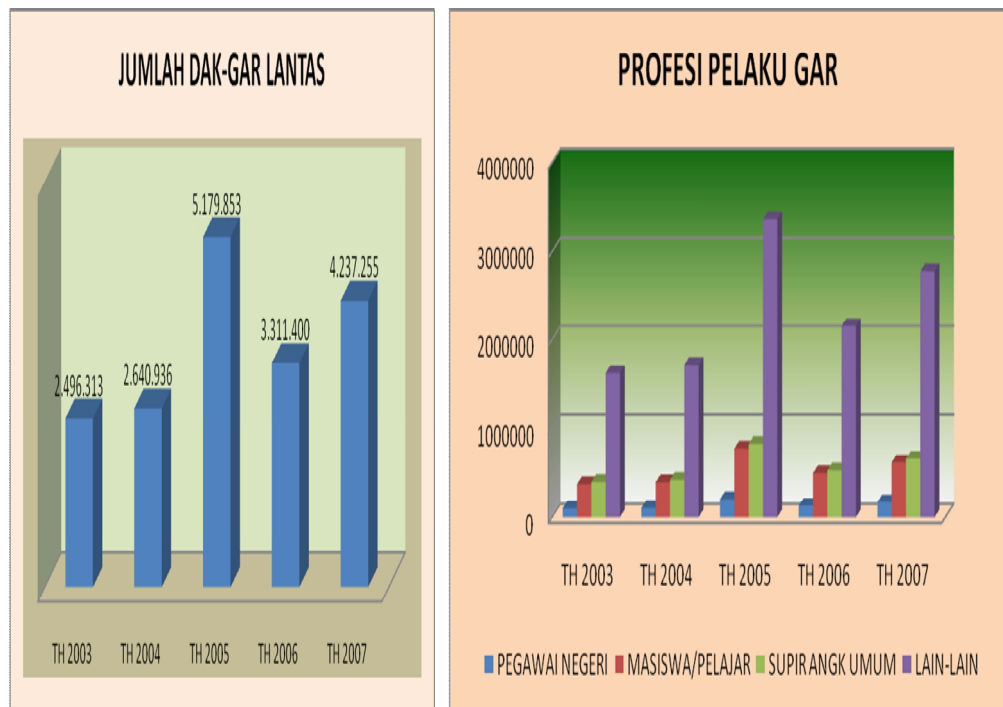
**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESI PROFESINYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**

| NO | TAHUN | JUMLAH GAR | SELESAI GAR | % | PROFESI | | | |
|----|-------|------------|-------------|------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | | | PEGAWAI NEGERI | MAHASISWA/PELAJAR | SUPIR ANGK UMUM | LAINNYA |
| 1 | 2003 | 2.496.313 | 2.296.713 | 85,4 | 99.853 | 374.447 | 399.410 | 1.622.603 |
| 2 | 2004 | 2.640.936 | 2.230.636 | 87,1 | 105.637 | 396.140 | 422.550 | 1.716.608 |
| 3 | 2005 | 5.179.853 | 4.577.451 | 88,2 | 207.194 | 776.978 | 828.776 | 3.366.904 |
| 4 | 2006 | 3.311.400 | 2.811.445 | 88,1 | 132.456 | 496.710 | 529.824 | 2.152.410 |
| 5 | 2007 | 4.237.255 | 3.937.225 | 89,3 | 172.664 | 618.664 | 661.699 | 2.784.228 |

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESINYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detailnya.

Sumber Data : Ditlantas Polri

11. Jumlah Penindakan Tipiring.

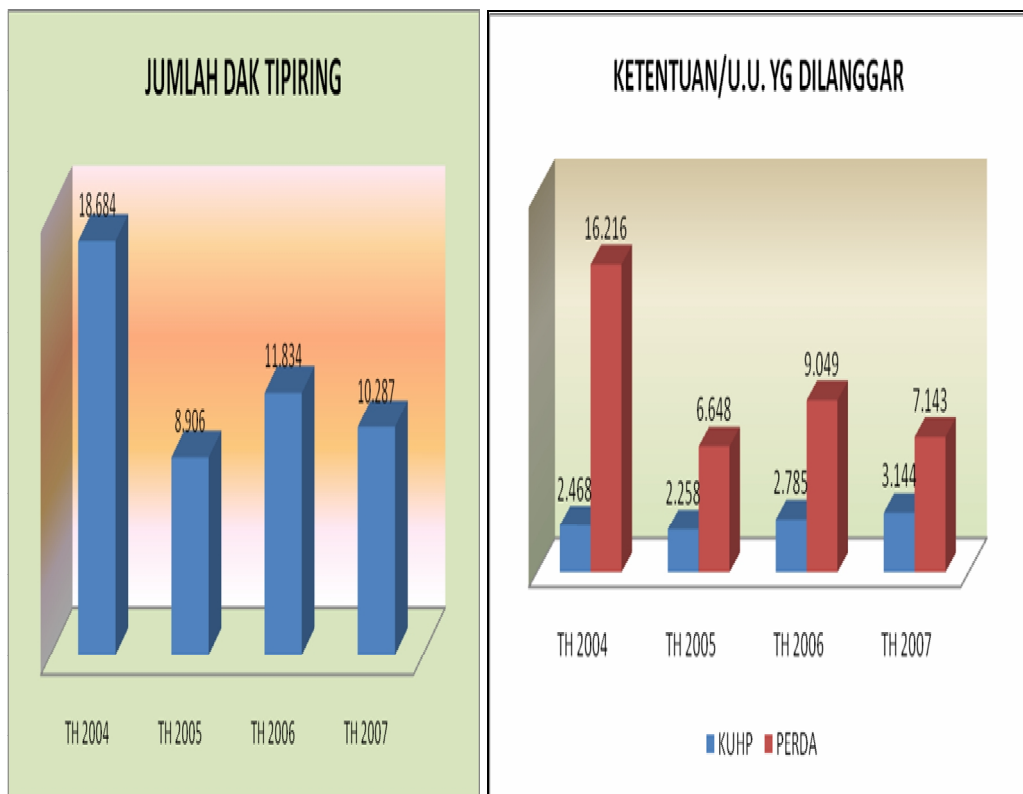
- a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

**JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING
THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA**

| NO | TAHUN | JUMLAH TINDAK TIPIRING | PENYELESAIAN TIPIRING | KETENTUAN/U.U. YANG DILANGGAR | |
|----|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | KUHP | PERDA |
| 1 | 2004 | 18.684 | 14.5834 | 2.468 | 16.216 |
| 2 | 2005 | 8.906 | 8.506 | 2.258 | 6.648 |
| 3 | 2006 | 11.834 | 10.356 | 2.785 | 9.049 |
| 4 | 2007 | 10.287 | 9.681 | 3.144 | 7.143 |

- b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

**JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING
THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Ditsamapta Polri.

12. Jumlah Tahanan.

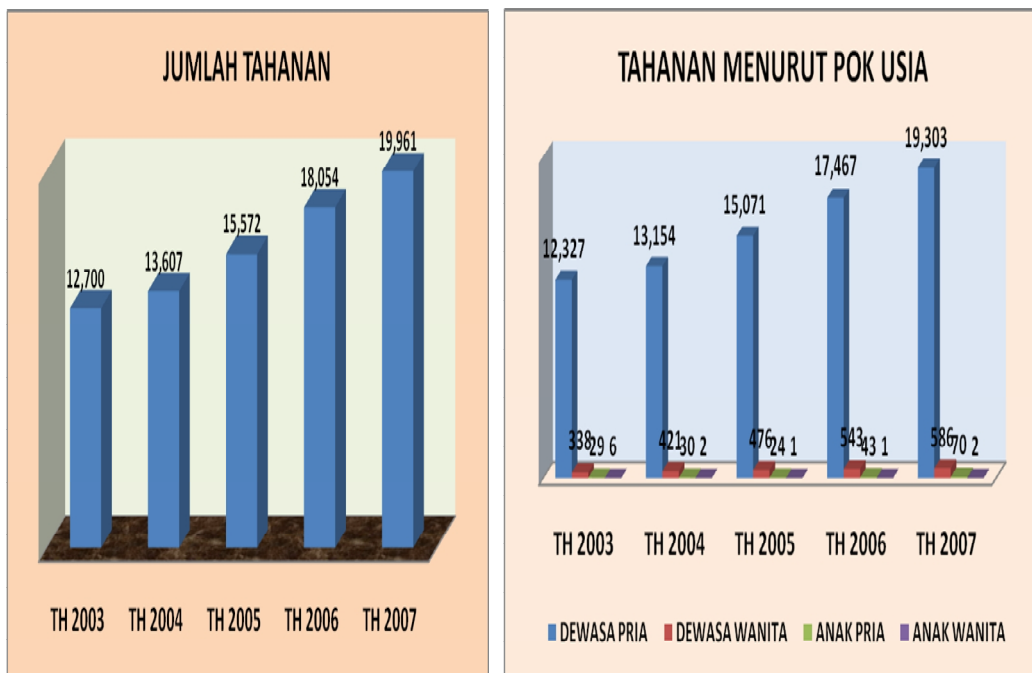
- 1) Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

**JUMLAH TAHANAN
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**

| NO | PERIODE WAKTU | JUMLAH TAHANAN | DEWASA | | ANAK-ANAK | |
|----|---------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | PRIA | WANITA | PRIA | WANITA |
| 1 | 2003 | 12.700 | 12.327 | 338 | 29 | 6 |
| 2 | 2004 | 13.607 | 13.154 | 421 | 30 | 2 |
| 3 | 2005 | 15.572 | 15.071 | 476 | 24 | 1 |
| 4 | 2006 | 18.054 | 17.467 | 543 | 43 | 1 |
| 5 | 2007 | 19.961 | 19.303 | 586 | 70 | 2 |

- 2) Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

**JUMLAH TAHANAN
TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Bagwattah Pusdalops Polri

13. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Anggota Polri.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

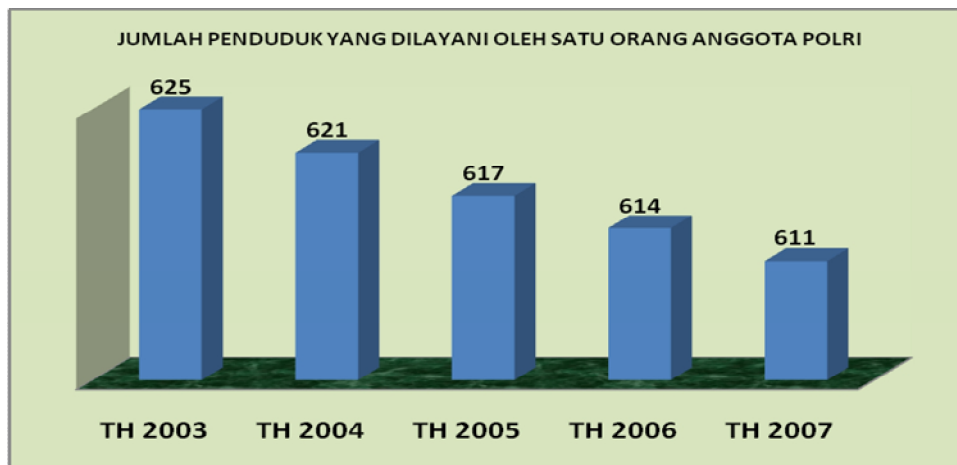
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK_DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI
TH 2003 S.D. 2007 DI INDONESIA

| NO | PERIODE WAKTU | JUMLAH ANGGOTA POLRI | JUMLAH PENDUDUK | PERBANDINGAN |
|----|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2003 | 320.000 | 200.000.000 | 1 : 625 |
| 2 | 2004 | 330.000 | 205.000.000 | 1 : 621 |
| 3 | 2005 | 340.000 | 210.000.000 | 1 : 617 |
| 4 | 2006 | 350.000 | 215.000.000 | 1 : 614 |
| 5 | 2007 | 360.000 | 220.000.000 | 1 : 611 |

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK_DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI
TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**